

***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) SEBAGAI UPAYA PENCAPAIAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGs)**

Oleh: Faturachman Alputra Sudirman¹, Muhammad Basri²,
Khoirul Huda³, Ambo Upe⁴

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Halu Oleo, Kendari

²Jurusan Administrasi Publik, Universitas Halu Oleo, Kendari

³Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Halu Oleo, Kendari

⁴Jurusan Sosiologi, Universitas Halu Oleo, Kendari

Abstrak

Pemerintah Indonesia berkomitmen dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang mesti dicapai pada 2030. Pemerintah memandang agar pelaksanaan pencapaian SDGs dilakukan secara partisipatif dari berbagai pihak. Pada level pemerintah lokal, pemerintah daerah Kota Kendari turut berpartisipasi dalam mendukung pelaksanaan tujuan SDGs melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs dengan mengintegrasikan program masing-masing Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terhadap target-target di dalam SDGs salah satunya melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang dijalankan oleh salah satu OPD di Kota Kendari. Studi ini bertujuan untuk menganalisa proses *collaborative governance* pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya mendukung pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Kota Kendari. Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan konsep proses *collaborative governance* dari Ansell dan Gash. Hasil studi ini menemukan bahwa pelaksanaan PKH di Kota Kendari dalam upaya pencapaian SDGs telah melibatkan partisipasi berbagai aktor pemerintah maupun non pemerintah dan PKH mampu untuk mengurangi kemiskinan yang selaras dengan tujuan SDGs ke- 1. Namun berbagai kendala dan tantangan juga hadir dalam pelaksanaan PKH dalam pencapaian SDGs di Kota Kendari seperti minimnya keterlibatan sektor privat dan keterbatasan pendanaan.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, PKH, SDGs.

PENDAHULUAN

Ketika pemerintah dari berbagai belahan dunia menyepakati *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada September 2015 dalam sidang umum PBB di New York, Amerika Serikat, sebagai agenda pembangunan Internasional yang mesti dicapai di tahun 2030. Hal ini kemudian memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk berkolaborasi dalam bentuk baru *governance* yang telah berkembang selama beberapa dekade. Kolaborasi memainkan peran penting dalam mencapai tujuan SDGs seperti menghilangkan kemiskinan. Berbagai inisiatif kemitraan antar pemerintah, masyarakat sipil, sektor privat mengubah cara pandang dalam memahami *governance* dan kebijakan publik (Florini & Pauli, 2018).

SDGs berisi 17 target yang dirancang untuk mengatasi masalah pembangunan di dunia terkait dengan pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Dengan disepakatinya SDGs sebagai agenda pembangunan internasional sekaligus

menjadikannya sebagai acuan dalam pembangunan bagi setiap negara anggota PBB (Department of Economic and Social Affairs Development Sustainable, 2020). Hal utama dari agenda SDGs oleh karena itu dipahami bahwa tidak ada aktor tunggal yang dapat mengatasi tantangan pembangunan keberlanjutan (Jabbour, 2015). Indonesia adalah salah satu negara yang *concern* dalam pencapaian SDGs tersebut. Pemerintah Indonesia mengintegrasikan SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Nasional serta mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 59 tahun 2017 tentang pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Hadirnya Perpres ini memberikan peluang kemitraan dari aktor pemerintah maupun non pemerintah untuk bersama-sama secara partisipatif dalam mencapai tujuan SDGs serta amanatkan kepada setiap pemerintah daerah untuk menyelaraskan program-program pembangunan yang dilakukan dibangun diatas prinsip *Sustainable Development* yang akan mendukung tercapainya target SDGs (Presiden Republik Indonesia, 2017).

Pada level pemerintah daerah tujuan SDGs ke-1 “tanpa kemiskinan” merupakan salah satu perhatian utama Kota Kendari yang memiliki visi menjadi “Kota Layak Huni”. Kota Layak Huni adalah kondisi dimana masyarakat diharapkan dapat hidup dengan nyaman, tenang, makmur, sehat, aman, selamat dan damai (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Kendari, 2017). Hingga periode Maret 2019, jumlah penduduk miskin di Kota Kendari adalah sebanyak 17 ribu atau 4,44 persen dari total jumlah penduduk (Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara, 2020). Melalui Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Kendari salah satu program yang diselaraskan dalam upaya pencapaian SDGs pada tujuan ke 1 ini ialah Program Keluarga Harapan (PKH) mengingat program ini program bantuan tunai bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin yang terdaftar berdasarkan tiga kategori, yaitu: pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Dari 17 ribu jumlah penduduk miskin di Kota Kendari sejumlah 7.209 di antaranya adalah penerima bantuan PKH (Dinas Sosial Kota Kendari, 2019). PKH merupakan program Kementerian Sosial yang pada praktiknya dijalankan oleh masing-masing pemerintah daerah. (Menteri Sosial, 2018).

Konsep pembangunan berkelanjutan mulai populer di tahun 1987 ketika *World Commission on Environment and Development* (WCED) mengeluarkan laporan yang dikenal sebagai *Brundtland Report* menekankan bahwa pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini turut memerhatikan kemampuan pembangunan kebutuhan generasi di masa mendatang. Dipicu dari Brundtland Report tersebut berkembanglah pemahaman bahwa pembangunan berkelanjutan mempertimbangkan tiga aspek secara simultan yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan (Meadowcroft, 2007). Pada perkembangannya perhatian terhadap pembangunan berkelanjutan mendapatkan momentumnya pada September 2015 yang membahas agenda 2030 untuk SDGs. Komunitas internasional telah mencapai kesepakatan tentang konsep pembangunan berkelanjutan yang dioperasionalkan melalui 17 tujuan, 169 target dan 232 indikatornya.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, *governance* dianggap sebagai alat kemudi yang penting dan sangat diperlukan (van Zeijl-Rozema et al., 2008). *Governance* pada SDGs dibutuhkan untuk mengembangkan suatu kondisi yang memungkinkan bagi suatu tindakan kolektif, memastikan bahwa berbagai aktor yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban dalam menangani pencapaian tujuan tersebut (Bowen et al., 2017). Menurut Ansell dan Gash (2007) ada beberapa poin penting dalam *collaborative governance* yaitu Pertama, forum diinisiasi oleh lembaga/institusi publik. Kedua, aktor non negara dilibatkan sebagai peserta. Ketiga, mereka terlibat secara langsung dalam pembuatan keputusan. Keempat, forum diatur secara formal dan bertemu secara kolektif. Kelima, forum bertujuan untuk membuat keputusan secara konsensus. Keenam, kolaborasi berfokus pada kebijakan publik atau manajemen publik. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kota Kendari dalam upaya pencapaian SDGs melibatkan kolaborasi antar lembaga baik dari pemerintah maupun non pemerintah serta aktor-aktor lainnya di tingkat lokal.

Berbagai studi yang telah mengkaji mengenai *governance* dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) seperti kolaborasi antar sektor (Florini & Pauli, 2018), kolaborasi sektor privat (Vazquez-Brust et al., 2020), aspek-aspek dan sistem *governance* dalam pencapaian SDGs (Glass & Newig, 2019; Morita, Okitasari, & Masuda, 2020). Serta studi tentang peran Pemerintah Kota Kendari dalam pencapaian SDGs baik yang fokus pada lingkungan dan ekonomi kreatif (Sudirman & Phradiansah, 2019; Sudirman, Susilawaty, & Adam, 2020). Namun masih sedikit ditemukan studi yang pencapaian SDGs yang berfokus pada Program Keluarga Harapan (PKH) pada level pemerintah daerah. Oleh karena itu perlunya studi yang membahas tentang *collaborative governance* dalam upaya pencapaian SDGs melalui program PKH yang berfokus pada SDGs ke 1 ‘tanpa kemiskinan’.

Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi *collaborative governance* pencapaian SDGs tujuan ke 1 di Kota Kendari melalui Program Keluarga Harapan dengan menggunakan konsep *collaborative governance* yang berfokus pada proses *governance* yang terdiri dari dialog tatap muka (face to face dialogue), membangun kepercayaan (trust-building), komitmen terhadap proses (commitment to process), membangun pemahaman bersama (shared understanding), serta hasil jangka menengah (intermediate outcomes) (Ansell & Gash, 2007).

Bagian pertama dari artikel ini dimulai dari gambaran aksi pemerintah Kota Kendari dalam pencapaian SDGs, Selanjutnya pada bagian kedua analisa *collaborative governance* dalam upaya pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui Program Keluarga Harapan (PKH) fokus pada proses kolaborasi yaitu dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, membangun pemahaman bersama, dan hasil jangka menengah. Kemudian pada bagian akhir ditutup dengan uraian mengenai tantangan pencapaian SDGs dalam PKH di Kota Kendari.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian-deskriptif dengan pendekatan-kualitatif merupakan basis metode yang digunakan dalam riset ini. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara, sedangkan data sekunder menggunakan dokumen laporan, jurnal, studi akademik, artikel berita *online* yang relevan dengan penelitian ini. Terkait dengan informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan pemahaman serta pengetahuan informan atas informasi dan masalah secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data. Adapun informan tersebut ialah Kepala Bidang Sosial dan Budaya Bappeda Kota Kendari, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Kendari, Supervisor Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Kendari, dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Kendari. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis model interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta simpulan (Miles, Huberman, & Saldana, 2014).

PEMBAHASAN

Aksi Pencapaian SDGs Kota Kendari

Dalam pencapaian SDGs di Kota Kendari, perencanaan dilakukan dengan menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs oleh BAPPEDA Kota Kendari. Kemudian pelaksanaan dilakukan oleh OPD sebagai pelaksana teknis di lapangan serta swasta/*private* sebagai mitra dalam pelaksanaan. Kemudian Bappeda Kota Kendari melakukan proses monitoring dan evaluasi terkait *progress* pembangunan yang telah dilakukan (Bappeda Kota Kendari, 2020).

Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs adalah rencana kerja lima tahun di tingkat daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs yang sesuai dengan visi-misi pembangunan daerah. Visi Misi Pembangunan Kota Kendari yang termuat dalam RPJMD diterjemahkan ke dalam dokumen RAD SDGs yang berisi rangkaian kegiatan pembangunan 5 tahun yang dapat mendukung pencapaian target agenda Internasional SDGs. Di dalamnya terdapat pemetaan peran para aktor dalam bentuk rumusan kebijakan, program, kegiatan, indikator yang terukur serta sumber pembiayaannya.

Penyusunan RAD SDGs dilakukan oleh BAPPEDA Kota Kendari dengan metode *Focus Group Discussussion* (FGD). Proses penyusunan ini melibatkan aktor-aktor dalam lingkup Kota Kendari yakni Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Kendari, NGO, BUMN, LSM, dan *stakeholders* lainnya dalam mendukung pembangunan di Kota Kendari target SDGs Kota Kendari. Dalam kegiatan penyusunan dokumen RAD SDGs Kota Kendari juga di undang perwakilan perusahaan/sektor *private* di kota kendari yang diharapkan dapat turut mendukung pencapaian SDGs melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*), namun dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang isu SDGs yang dimiliki oleh sektor *private* di Kota Kendari menyebabkan kurangnya partisipasi dari sektor privat dalam penyusunan ini.

Collaborative Governance Pelaksanaan PKH dalam Upaya Pencapaian SDGs

Berdasarkan dokumen RAD SDGs Kota Kendari, pencapaian target SDGs ke-1 di Kota Kendari dilakukan melalui pelaksanaan PKH. Pemerintah Kota Kendari menargetkan tersalurkannya bantuan sosial PKH kepada 7.327 KPM di tahun 2019. Program Keluarga Harapan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Kendari selaku penanggung jawab program bekerjasama dengan beberapa *stakeholders* antara lain: Dinas Pendidikan Kota Kendari, Dinas Kesehatan Kota Kendari, Departemen Agama Kota Kendari, dan Bank BRI cabang Kendari. Kemitraan ini sesuai dengan aturan dasar PKH sebagaimana yang tercantum dalam Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2019. Sebagaimana hasil wawancara peneliti kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Kendari bahwa komponen bantuan PKH mencakup sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial sehingga di tingkat pusat yaitu Kementerian Sosial bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian yang lainnya sedangkan pada level daerah dilakukan koordinasi antar dinas.

1. Dialog tatap muka (*Face-to-face Dialogue*)

Tahap yang sangat penting pada proses *collaborative governance* adalah dialog tatap muka yang berorientasi pada konsensus atau kesepakatan bersama. Dalam pelaksanaan PKH Kota Kendari, dialog tatap muka dilakukan dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD). FGD ini dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan PKH untuk didiskusikan bersama-sama oleh para *stakeholders*. Diantara hal yang menjadi topik diskusi para aktor adalah mengenai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program PKH. FGD ini juga melibatkan *stakeholders* terkait yang dapat membantu dalam diskusi penyelesaian masalah.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa FGD dalam pelaksanaan PKH Kota Kendari berguna sebagai forum pengambilan keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah melalui diskusi. Forum ini juga merupakan wadah untuk melakukan advokasi dan rekonsiliasi dengan berbagai pihak yang bertujuan untuk menyelesaikan kendala yang ada. Semua pihak yang terlibat dalam PKH ditempatkan di posisi yang sama. Hal ini dilakukan untuk memastikan partisipasi aktif dari tiap-tiap aktor karena keberadaan forum diskusi merupakan aspek yang mendukung keberhasilan *Collaborative Governance* (Gollagher & Hartz-Karp, 2013).

2. Membangun Kepercayaan (*Trust Building*)

Kepercayaan antara *stakeholders* adalah hal yang sangat penting dalam proses kolaborasi pelaksanaan PKH Kota Kendari. Terlebih lagi, banyaknya pihak yang terlibat menyebabkan pentingnya upaya saling membangun kepercayaan. Oleh karena itu, hadirnya rasa saling percaya di antara aktor yang didasarkan pada hubungan yang profesional merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong keberhasilan *Collaborative Governance* (Sudarmo, 2011). Tahapan ini sangat penting karena diperlukan adanya sikap saling percaya diantara para aktor yang terlibat dalam menjalankan proses kolaborasi pelaksanaan PKH di Kota Kendari.

Kepercayaan antara para aktor yang terlibat dalam pelaksanaan PKH Kota

Kendari dibangun dengan adanya koordinasi sesama aktor melalui komunikasi yang baik. Dinas Sosial Kota Kendari selaku penanggungjawab PKH mengadakan forum FGD yang bertujuan untuk membentuk kepercayaan dengan mengundang seluruh aktor terkait untuk berkoordinasi dan mendiskusikan masalah yang dihadapi terkait pelaksanaan PKH. Hal ini diperkuat dengan adanya kesepakatan di akhir FGD yang didokumentasikan ke dalam dokumen berupa *Memorandum of Understanding* (MoU) ataupun berita acara. Hal inipun sesuai dengan studi Bao, Bhalla, dan Bennett (2015) bahwa pemahaman bersama sangat diperlukan tentang relevansi para aktor yang terlibat terhadap upaya pencapaian SDGs.

3. Komitmen Terhadap Proses (*Commitment to Process*)

Pelaksanaan PKH di Kota Kendari perlu dibangun diatas komitmen yang kuat antara para stakeholders yang terlibat. Hal ini dikarenakan adanya komitmen dari para aktor yang berasal dari OPD Kota Kendari akan menentukan keberhasilan program PKH dalam penanggulangan kemiskinan yang sesuai visi Kota Kendari menjadi Kota Layak Huni dan tertulis dalam dokumen RAD SDGs Kota Kendari. Dalam proses Kolaborasi pelaksanaan PKH Kota Kendari, para aktor yang terdiri dari Dinas Sosial Kota Kendari, Dinas Pendidikan Kota Kendari, Dinas Kesehatan Kota Kendari, Departemen Agama Kota Kendari dan Bank BRI menunjukkan komitmennya dengan menghadiri *Focus Group Discussion* untuk mengevaluasi pelaksanaan PKH dan mendiskusikan langkah strategis dalam mengatasi masalah yang dihadapi.

Meski demikian, besarnya komitmen para aktor pelaksana PKH belum didukung dengan dana dampingan (*sharing*) yang mencukupi. Berdasarkan pedoman pelaksanaan PKH 2019 pemerintah Kota wajib memberikan alokasi sebesar 5 persen dari bantuan sosial PKH untuk operasional pelaksana PKH Kota Kendari yang sumbernya dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan wawancara dengan salah satu pendamping PKH Kota Kendari bahwa pelaksanaan PKH di Kota Kendari terkendala dalam dana operasional yang hanya sebesar 118 juta yang bersumber dari APBD dan belum mencukupi ketentuan 5% dari pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan kendala tersendiri bagi pendamping dalam melaksanakan tugasnya mendampingi KPM. Kurangnya komitmen berupa dana *sharing* yang belum mencukupi ketentuan 5 persen menyebabkan terjadinya kendala pada proses pelaksanaan PKH salah satunya yaitu dalam pelaksanaan *Family development session* dimana modul yang dibutuhkan tidak dapat dimiliki oleh seluruh KPM, sehingga dalam pelaksanaan FDS pendamping harus bergiliran membawa modul untuk dipinjamkan kepada KPM dalam sesi pertemuan keluarga, padahal kegiatan FDS merupakan sesi pertemuan bulanan yang sangat penting dalam memberikan edukasi dan membangun pemahaman bagi KPM.

4. Sikap Saling Memahami (*Shared Understanding*)

Menurut Ansell dan Gash, sikap saling memahami (*shared understanding*) adalah kesamaan pemahaman atau persepsi yang dimiliki para aktor akan tujuan kolaborasi yang ingin dicapai (Ansell & Gash, 2007). Dalam pelaksanaan Program Keluarga

Harapan Kota Kendari upaya membangun sikap saling memahami dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Kendari dalam bentuk kegiatan *Service Provider*. Kegiatan *Service Provider* merupakan kegiatan sosialisasi dari pelaksana PKH kepada Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas di Kota Kendari terkait pelaksanaan Program Keluarga Harapan itu sendiri. Kegiatan ini merupakan upaya membangun kesepahaman bersama dengan para *stakeholders* agar dapat bekerjasama dengan pelaksana PKH dalam hal-hal yang diperlukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pendamping PKH Kota Kendari diketahui bahwa sebagian Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas di Kota Kendari sebelum diadakannya *service provider* mereka belum memahami tentang pelaksanaan PKH. Hal ini menjadi kendala tersendiri bagi pelaksana PKH Kota Kendari karena penerima bantuan PKH pengguna fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan yang wajib untuk terus dipantau kehadirannya di sekolah dan di puskesmas. Atas ketidakpahaman tersebut terkadang pendamping PKH Kota Kendari yang melakukan verifikasi kehadiran penerima PKH di sekolah-sekolah mengalami kendala dalam pemutakhiran data KPM. Sehingga kegiatan *Service Provider* sangat penting guna memberikan pemahaman tentang program PKH kepada Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas di Kota Kendari.

5. Hasil Jangka Menengah (*Intermediate Outcomes*)

Dalam konteks pembangunan dan pencapaian SDGs di Kota Kendari, pelaksanaan kolaborasi Program Keluarga Harapan telah memberikan hasil-hasil sementara, yaitu:

a. Realisasi Penyaluran Bantuan PKH Kota Kendari

Melalui upaya kolaborasi yang dilakukan para aktor dalam pelaksanaan PKH Kota Kendari mendorong berhasilnya penyaluran dana bantuan sosial PKH Kota Kendari. Terlebih lagi penyaluran dan bantuan sosial yang dilakukan secara non-tunai baik melalui ATM maupun agen-agen yang telah ditunjuk. Sistem ini memudahkan KPM karena mengurangi biaya untuk melakukan pencairan di kantor pos seperti yang dilakukan sebelumnya dan sekaligus menambah wawasan *financial literacy* bagi KPM hal ini merupakan kerjasama pemerintah Kota Kendari dengan bank BRI sebagai salah satu bank dalam Himpunan Bank Negara (kendarikota.go.id, 2018).

Selain itu, keberhasilan terealisasinya penyaluran dana bantuan sosial PKH tidak terlepas dari adanya kegiatan FGD sebagai forum diskusi untuk membahas kendala dalam pelaksanaan PKH Kota Kendari. FGD menjadi sarana rekonsiliasi antara pelaksana PKH Kota Kendari dengan penerima PKH dan pihak Bank dalam menyelesaikan kendala penyaluran dana seperti jika terjadi kesalahan biodata ataupun administrasi. Hasil kolaborasi para aktor dalam pelaksanaan PKH Kota Kendari di tahun 2019 ditandai dengan realisasi penyaluran bantuan sosial PKH sebanyak 7.079 KPM secara non-tunai dengan persentase keberhasilan sebesar 96,6 persen dari jumlah 7.327 bantuan yang ditargetkan dalam RAD SDGs Kota Kendari (Dinas Sosial Kota Kendari, 2019).

b. Tersedianya Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan bagi KPM

Program Keluarga Harapan (PKH) didesain agar kemiskinan antar generasi mampu dikurangi melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan pendidikan maupun kesehatan bagi anak-anak sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam pelaksanaan PKH di Kota Kendari, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dapat mengakses fasilitas pendidikan maupun kesehatan yaitu dengan memeriksakan kondisi kesehatan bayi di Posyandu, perawatan di puskesmas dan Rumah Sakit serta untuk menempuh pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas. Selain itu, bantuan ini juga ditunjang dengan adanya bantuan komplementer PKH seperti (KIS) atau Kartu Indonesia Sehat yang ditujukan untuk bidang kesehatan, Kartu Indonesia Pintar yang penggunaannya untuk bidang pendidikan, dan Bantuan Pangan non-Tunai pada bidang sosial. Pelaksanaan PKH sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai 100 persen KPM menggunakan layanan, baik untuk layanan Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial (Bappeda Kota Kendari, 2018).

c. Perubahan Perilaku KPM

Penerima PKH Kota Kendari didorong untuk dapat memiliki kemandirian dan perubahan perilaku melalui edukasi yang diberikan pada pertemuan setiap bulan. *Family Development Session* (FDS) merupakan program edukasi secara terstruktur diberikan kepada penerima PKH untuk meningkatkan keterampilan hidup KPM. Di dalamnya diajarkan materi berupa modul-modul ekonomi, pendidikan anak, kesehatan, dan perlindungan anak. Pada kesempatan inilah pendamping mengajarkan nilai-nilai pengasuhan anak kepada KPM seperti pola pengasuhan anak dan pengelolaan keuangan keluarga. Selain itu pendamping juga memberikan dorongan kepada KPM agar disiplin dalam memenuhi kewajiban peserta PKH seperti rutin hadir di sekolah dan memeriksakan kesehatan di puskesmas demi kelancaran masuknya bantuan PKH. Dari hasil wawancara dengan pendamping PKH diketahui bahwa melalui FDS, KPM diberikan edukasi agar ada perubahan perilaku. Contoh materi yang diberikan itu pola pengasuhan anak, ekonomi, penanggulangan anak terlantar, masalah gizi kesehatan, penanganan lansia dan penyandang disabilitas. Melalui materi yang diberikan diharapkan ada perubahan perilaku dari KPM, hasilnya terlihat ketika sebelumnya ada kebiasaan sering memukul anak atau membentak anak agar dapat berubah. Kemudian diarahkan bagaimana memotivasi anak agar rajin ke sekolah karena jika kehadiran anak di sekolah kurang dari 85% maka bantuannya ditangguhkan.

d. Usaha Bersama dan Penguatan Ekonomi bagi KPM

Kolaborasi pelaksanaan PKH di Kota Kendari juga mendorong KPM PKH untuk melaksanakan kegiatan ekonomi secara bersama-sama melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang diharapkan dapat menjadi sumber nafkah keluarga penerima manfaat PKH. Melalui program ini, KPM dapat mengeksplorasi kemampuan dan potensinya seperti mengelola suatu bisnis atau usaha secara berkelompok dengan bantuan modal dari Kementerian Sosial RI. KUBE PKH men-

dapatkan bantuan dari pemerintah pusat sejak sebesar 30 juta rupiah dengan rincian 10 juta untuk renovasi warung dan 15 juta untuk renovasi di dalamnya termasuk pemasangan instalasi listrik. Sisa anggaran dijadikan modal usaha termasuk tempat penyaluran bantuan pangan non-tunai lainnya. Selain itu, agar bantuan modal KUBE dapat dimanfaatkan oleh KPM secara tepat sasaran, Dinas Sosial Kota Kendari memberikan bimbingan teknis kepada penerima bantuan untuk menghindari penyalahgunaan bantuan tersebut (Sultrakini.com, 2019).

KPM PKH Kota Kendari telah mengembangkan usaha KUBE melalui jenis-jenis usaha yang bervariasi seperti mulai dari kuliner seperti bakso, menjual sembako, sayuran, ataupun usaha-usaha mikro kecil lainnya. Salah satu contoh Kelompok Usaha Bersama yang berhasil dirintis dalam PKH Kota Kendari adalah KUBE Pengasapan Ikan dari Kelurahan Labibia, Kecamatan Mandonga. KUBE ini menjalankan usaha setelah memperoleh cairan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dari Kementerian Sosial RI sejak bulan Juli 2019. Bantuan yang diterima dimanfaatkan oleh KPM sebagai modal awal untuk membeli bahan baku dan peralatan produksi. Usaha panggang ikan (ikan asap) ini mampu mengolah sekitar 100kg ikan per hari. Meski baru dirintis, usaha pengasapan ikan ini mampu meningkatkan perekonomian anggota KUBE “Nunulai” di Kelurahan Labibia, Kota Kendari. (Dinas Sosial Prov.Sultra, 2020). Keberhasilan KUBE lain yang menunjukkan peningkatan perekonomian bagi KPM adalah seperti yang dialami oleh KUBE Barakati Sejahtera dari Kecamatan Puuwatu. Melalui penjualan sembako dan Alat Tulis Kantor, KUBE ini telah berhasil mengelola usaha dengan sukses dan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat yang tergabung di dalamnya, di mulai dengan modal awal Rp. 5.000.000 KUBE ini berhasil mengelola usahanya dengan baik hingga mampu meraup keuntungan sebesar Rp. 30.000.000. Program kelompok usaha bersama (KUBE) telah berperan dalam mewujudkan kesejahteraan bagi KPM PKH di Kota Kendari. Banyak diantara KPM yang mengalami peningkatan ekonomi dan keluar/graduasi dari keanggotaan PKH disebabkan terbantu melalui usaha yang dirintis bersama pada KUBE.

Berdasarkan paparan mengenai hasil kolaborasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PKH Kota kendari telah berperan penting dalam penguatan masyarakat miskin baik berupa bantuan sosial, akses fasilitas pendidikan dan kesehatan, kemandirian dan perubahan perilaku, serta penguatan ekonomi. Hasil Penelitian kerjasama Bappeda Kota Kendari dan Universitas Halu Oleo pada tahun 2018 mengenai evaluasi kebijakan Program Keluarga Harapan Kota Kendari ditemukan bahwa dari 400 responden KPM sebanyak 77.3 persen menilai PKH sangat membantu dalam meningkatkan kehidupan ekonomi mereka, untuk mengurus pendidikan anak-anak mereka, serta kesehatan keluarga. Kemudian sebanyak 17 persen menilai membantu, dan 5.8 persen menilai cukup membantu (Bappeda Kota Kendari, 2018).

Berbagai keterlibatan dan kolaborasi aktor pemerintah dan non pemerintah mulai penyusunan RAD SDGs serta pelaksanaan PKH ternyata mampu ber-

kontribusi mendukung pencapaian SDGs ke 1 di tingkat lokal hal ini kemudian sesuai dengan studi (Florini & Pauli, 2018; Vazquez-Brust et al., 2020) terkait *collaborative governance* dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Selanjutnya, berdasarkan hasil sementara dalam proses *collaborative governance* tersebut, PKH telah berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan di Kota Kendari dalam beberapa tahun terakhir dari 5.59 persen pada tahun 2016 turun menjadi 4.44 persen pada tahun 2019 (BPS Sultra, 2020). Hal ini selaras dengan studi Kilburn et al., (2020) dan Ferreira, Schady, Bank, & Fiszbein (2009) bahwa program perlindungan sosial seperti *Conditional Cash Transfer* atau PKH mampu mengurangi kemiskinan, memenuhi kebutuhan serta meningkatkan kehidupan yang lebih layak utamanya dalam aspek ekonomi, hal ini juga menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan sosial seperti PKH secara simultan mampu menangani multi target SDGs secara simultan tidak hanya pada tujuanbidang ekonomi, namun juga pada tujuan bidang pendidikan, serta kesehatan.

Tantangan Pelaksanaan PKH dalam Pencapaian SDGs

Hambatan dalam pencapaian SDGs ke-1 di Kota Kendari melalui Program Keluarga Harapan adalah berkuat dalam dua hal yaitu keterlibatan sektor privat atau dunia usaha berkaitan dengan kesadaran dan pemahaman tentang program SDGs dan keterbatasan pendanaan untuk pelaksanaan program PKH Kota Kendari. Kedua faktor tersebut banyak berpengaruh dalam upaya pencapaian SDGs di Kota Kendari dan menyebabkan upaya yang dilakukan menemui hambatan.

1. Rendahnya Keterlibatan Sektor Privat

Masalah yang dialami dalam proses penyusunan RAD SDGs Kota Kendari adalah kurangnya keterlibatan pelaku bisnis dari sektor swasta baik dalam pemetaan peran maupun dalam upaya pencapaian tujuan SDGs itu sendiri. Ketika proses penyusunan dokumen, Pemerintah Kota Kendari telah mengundang perwakilan perusahaan/sektor *private* di kota Kendari yang diharapkan dapat turut mendukung pencapaian SDGs melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*), namun dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang isu SDGs yang dimiliki menyebabkan kurangnya partisipasi dari sektor privat dalam penyusunan dokumen ini, padahal keterlibatan dunia usaha atau sektor privat dalam pencapaian SDGs sangat berkontribusi dalam mendukung pencapaian SDGs (Florini & Pauli, 2018; Pattberg & Widerberg, 2016). Namun di Kota Kendari, belum semua sektor privat atau dunia usaha mengetahui dan memahami program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Oosterhof (2018) menekankan hal terpenting dan utama dalam upaya pencapaian SDGs di tingkat lokal ialah kesadaran akan SDGs itu sendiri, kesadaran akan pentingnya SDGs dapat melahirkan pemahaman yang jelas sehingga mendorong kebijakan pembangunan di tingkat lokal sesuai dengan agenda SDGs.

2. Keterbatasan Pendanaan

Keterbatasan pendanaan yang dialami yaitu kurangnya dana dampingan dari APBD dalam Pelaksanaan PKH Kota Kendari yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial 1 Tahun 2018 Pasal 57. Berdasarkan peraturan tersebut, pemerintah Kota

Kendari mempunyai kewajiban mengalokasikan sekurang-kurangnya 5 persen dari bantuan sosial PKH bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang diterima dari pusat untuk operasional pelaksana PKH Kota Kendari.

Hasil wawancara dengan pendamping PKH Kota Kendari bahwa pelaksanaan PKH di Kota Kendari terkendala dalam dana operasional yang hanya sebesar 118 juta yang bersumber dari APBD dan belum mencukupi ketentuan 5 persen. Hal ini menyebabkan kendala tersendiri bagi pendamping dalam melaksanakan tugasnya mendampingi KPM. Kurangnya dana *sharing* yang belum mencukupi ketentuan 5 persen menyebabkan terjadinya kendala bagi pendamping pada pelaksanaan PKH Kota Kendari. Padahal pendanaan berkelanjutan sebagai faktor yang berperan penting dalam menyukseskan upaya pencapaian SDGs (Pattberg & Widerberg, 2016).

PENUTUP

Pemerintah Kota Kendari turut serta dalam mendukung pencapaian SDGs seperti yang diamanatkan Perpres No 59 Tahun 2017 melalui penyusunan dan penetapan RAD SDGs yang menjadi dasar dalam pelaksanaan SDGs di tingkat lokal. salah satu program yang dilaksanakan dalam pencapaian target SDGs ialah Program Keluarga Harapan (PKH) yang dalam proses *collaborative governance* pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak baik dari pemerintah dan non pemerintah dalam. Hasil jangka menengah PKH menunjukkan bahwa program ini mampu mendukung pencapaian target SDGs ke 1 dalam pengentasan kemiskinan. Namun, upaya pencapaian SDGs melalui PKH di tingkat lokal juga menemui kendala terkait keterlibatan dari sektor privat serta ketersediaan pendanaan, diharapkan bahwa keterlibatan sektor privat seperti korporasi dan dunia usaha mampu mendukung target pencapaian SDGs di tingkat lokal. Kontribusi dari studi ini juga tidak luput dari beberapa keterbatasan yang ada, kurangnya ketersediaan data seperti tingkat pemahaman sektor privat di Kota Kendari terhadap SDGs, serta dampak mikro terhadap KPM dalam peningkatan ekonomi keluarga, sehingga studi selanjutnya dapat dilakukan dengan mengeksplor dan menganalisa lebih dalam terkait tingkat pemahaman sektor privat dalam pencapaian SDGs di Kota Kendari serta dampak ekonomi secara mikro dari KPM.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Kendari. (2017). *RPJMD Kota Kendari Tahun 2017-2022*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara. (2020). *Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Angka*. Kendari: BPS Prov. Sulawesi Tenggara.

- Bappeda Kota Kendari. (2018). *Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Perkotaan*. Kendari.
- Bappeda Kota Kendari. (2020). *Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs Kota Kendari*. Kendari: Pemerintah Kota Kendari.
- Bowen, K. J., Craddock-Henry, N. A., Koch, F., Patterson, J., Häyhä, T., Vogt, J., & Barbi, F. (2017). Implementing the “Sustainable Development Goals”: towards addressing three key governance challenges—collective action, trade-offs, and accountability. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 26–27, 90–96. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2017.05.002>
- Department of Economic and Social Affairs Development Sustainable. (2020). The 17 Goals. Retrieved October 8, 2020, from United Nations website: <https://sdgs.un.org/goals>
- Dinas Sosial Kota Kendari. (2019). *Laporan Program dan Capaian Dinas Sosial Kota Kendari*. Kendari: Dinas Sosial Kota Kendari.
- Dinas Sosial Prov.Sultra. (2020). Monitoring Program Kube Dekonsentrasi Kota Kendari 2019. Retrieved June 22, 2020, from dinsos.sultraprov.go.id website: <http://dinsos.sultraprov.go.id/index.php/2020/01/09/monitoring-program-kube-dekonsentrasi-kota-kendari-2019/>
- Ferreira, F. H. G., Schady, N. R., Bank, W., & Fiszbein, A. (2009). *Conditional Cash Transfers: Reducing Present and Future Poverty (A World Bank Policy Research Report)*. World Bank Group.
- Florini, A., & Pauli, M. (2018). Collaborative governance for the Sustainable Development Goals. *Asia & the Pacific Policy Studies*, 5(3), 583–598. <https://doi.org/10.1002/app5.252>
- Glass, L.-M., & Newig, J. (2019). Governance for achieving the Sustainable Development Goals: How important are participation, policy coherence, reflexivity, adaptation and democratic institutions? *Earth System Governance*, 2, 100031. <https://doi.org/10.1016/j.esg.2019.100031>
- Gollagher, M., & Hartz-Karp, J. (2013). The Role of Deliberative Collaborative Governance in Achieving Sustainable Cities. *Sustainability*, 5(6), 2343–2366. <https://doi.org/10.3390/su5062343>
- Jabbour, A. B. L. de S. (2015). Understanding the genesis of green supply chain management: lessons from leading Brazilian companies. *Journal of Cleaner Production*, 87, 385–390. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.09.034>
- kendarikota.go.id. (2018). Launching Kartu Keluarga Sejahtera – Bantuan Pangan NonTunai (KKS-BPNT) Tahap III (Tiga) Kota Kendari. Retrieved June 6, 2020, from Diskominfo Kota Kendari website: <https://www.kendarikota.go.id/berita/launching-kartu-keluarga-sejahtera-bantuan-pangan-nontunai-kks-bpnt-tahap-iii-tiga-kota-kendari/>

- Kilburn, K., Ferrone, L., Pettifor, A., Wagner, R., Gómez-Olivé, F. X., & Kahn, K. (2020). The Impact of a Conditional Cash Transfer on Multidimensional Deprivation of Young Women: Evidence from South Africa's HTPN 068. *Social Indicators Research*, *151*(3), 865–895. <https://doi.org/10.1007/s11205-020-02367-y>.
- Meadowcroft, J. (2007). Who is in Charge here? Governance for Sustainable Development in a Complex World*. *Journal of Environmental Policy & Planning*, *9*(3–4), 299–314. <https://doi.org/10.1080/15239080701631544>
- Menteri Sosial. (2018). Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Retrieved July 26, 2020, from JDIH BPK RI website: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/129999/permensos-no-1-tahun-2018>.
- Miles, M. B., Huberman, M. A., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Washington D.C: Sage Publications, Inc.
- Morita, K., Okitasari, M., & Masuda, H. (2020). Analysis of national and local governance systems to achieve the sustainable development goals: case studies of Japan and Indonesia. *Sustainability Science*, *15*(1), 179–202. <https://doi.org/10.1007/s11625-019-00739-z>
- Oosterhof, P. D. (2018). *Localizing the Sustainable Development Goals to Accelerate Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development*.
- Pattberg, P., & Widerberg, O. (2016). Transnational multistakeholder partnerships for sustainable development: Conditions for success. *Ambio*, *45*(1), 42–51. <https://doi.org/10.1007/s13280-015-0684-2>
- Presiden Republik Indonesia. (2017). Peraturan Presiden Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Retrieved June 23, 2020, from JDIH BPK RI website: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/72974/perpres-no-59-tahun-2017>
- Sudarmo. (2011). *Isu-isu Administrasi Publik dalam Perspektif Governance*. Solo: Smart Media.
- Sudirman, F. A., & Phradiansah, P. (2019). Tinjauan Implementasi Pembangunan Berkelanjutan: Pengelolaan Sampah Kota Kendari. *JURNAL SOSIAL POLITIK*, *5*(2), 291. <https://doi.org/10.22219/sospol.v5i2.9821>
- Sudirman, F. A., Susilawaty, F. T., & Adam, A. F. (2020). Peluang dan Tantangan Pengembangan Industri Kreatif Kuliner dalam Pencapaian SDGs. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, *9*(1), 12–24. <https://doi.org/10.35724/sjias.v9i1.2804>
- Sultrakini.com. (2019). Keciprat Bantuan KUBE, Dinsos Kendari Bekali Penerima agar Tepat Sasaran. Retrieved June 22, 2020, from Sultrakini.com website: <https://sultrakini.com/berita/keciprat-bantuan-kube-dinsos-kendari-bekali-penerima-agar-tepat-sasaran>.

- van Zeijl-Rozema, A., Cörvers, R., Kemp, R., & Martens, P. (2008). Governance for sustainable development: a framework. *Sustainable Development*, 16(6), 410–421. <https://doi.org/10.1002/sd.367>.
- Vazquez-Brust, D., Piao, R. S., de Melo, M. F. de S., Yaryd, R. T., & M. Carvalho, M. (2020). The governance of collaboration for sustainable development: Exploring the “black box.” *Journal of Cleaner Production*, 256, 120260. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120260>.